

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI KOPERASI SERBA USAHA
(STUDI KASUS DI KSU BHAKTI MULYA SURAKARTA)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DYAH AYU SEKAR ASRI
C100130212

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI KOPERASI SERBA USAHA
(STUDI KASUS DI KSU BHAKTI MULYA SURAKARTA)**

Naskah Publikasi Ini Disetujui Oleh Pembimbing Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Darsono, S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PINJAMMEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI KOPERASI SERBA USAHA
(STUDI KASUS DI KSU BHAKTI MULYA SURAKARTA)

Oleh:

DYAH AYU SEKAR ASRI

C100130212

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 1 November 2017

Dewan Penguji:

Ketua : Darsono, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.

Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.Hum. (

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Oktober 2017

Penulis



Dyah Ayu Sekar Asri
NIM. C100130212

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI KOPERASI SERBA USAHA
(STUDI KASUS DI KSU BHAKTI MULYA SURAKARTA)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta dan tanggung jawab pengurus dan upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian berbentuk perjanjian pinjam meminjam (kredit) secara tertulis dengan akta otentik meliputi perjanjian pokok yang disertai perjanjian tambahan yang berupa pembebanan dengan jaminan fidusia. Pengurus atau anggota koperasi yang melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan koperasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengembalikan pinjaman beserta jasa pinjaman sesuai ketentuan dan apabila masih belum bisa melunasi dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan asset peminjam. Sedangkan upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui negosiasi dan litigasi. Namun, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta dalam menyelesaikan masalah tersebut lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.

Kata kunci: *pelaksanaan perjanjian, pinjam-meminjam, jaminan fidusia*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of agreement between the debtor with the Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta and the responsibility of the management and the settlement efforts in case of wanprestasi in the implementation of the loan and lending agreement with fiduciary guarantee. The research method using normative approach method is descriptive. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. The results of the research indicate that the implementation of the agreement in the form of loan and loan agreement in writing with authentic deed covers the principal agreement accompanied by additional agreement in the form of fiduciary guarantee. Management or members of the cooperative who perform the act of default and harming the cooperative must be accountable for their actions by returning the loan along with the loan service in accordance with the provisions and if still can not pay off it is possible to seizure of the borrower's assets. While the settlement of non-performing loans through negotiations and litigation. However, the Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta in solving the problem prioritizes the welfare of its members and is familial.

Keywords: *contract implementation, borrowing, fiduciary guarantee*

1. PENDAHULUAN

Penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan lebih banyak kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), karena pada saat terjadinya krisis moneter UKM-lah yang tetap bertahan dengan segala keterbatasannya sehingga pemerintah perlu mengubah orientasinya dengan memberdayakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Penyaluran pinjaman kepada UKM dapat dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Di Indonesia lembaga keuangan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada UKM adalah Koperasi, karena koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga koperasi mendapat kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.¹

Berdasarkan pasal 43 UU Nomor 25 Tahun 1992 usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Serta kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang menjalankan berbagai jenis usaha demi memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Serta koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha.² Koperasi dapat digolongkan mejadi beberapa jenis yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam dan koperasi pemasaran. Koperasi Serba Usaha sendiri juga bisa memberikan pinjaman berupa uang kepada anggotanya.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya tergolong sebagai koperasi dengan skala usaha cukup besar. KSU ini melaksanakan usaha simpan pinjam. Permodalan koperasi ini meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, bantuan modal dari Dana Pembangunan Kalurahan

¹Revrisond Baswir, 1997, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, hal.41.

²Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, hal, 118.

(DPK), dan resiko modal. Perjanjian pinjam meminjam ini dapat menimbulkan suatu perikatan antara debitur dan kreditur. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang debitur lalai mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian. Didalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Dalam melakukan pinjaman tidak semua pihak memiliki kepemilikan barang atas barang atau hak tertentu yang dijadikan sebagai jaminan atas pemberian pinjaman. Peminjaman dengan jaminan fidusia lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Karena penjaminan fidusia tertuju pada benda bergerak, si debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan tujuannya memperoleh kredit tercapai.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk bentuk perjanjian antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian dan mengetahui tanggung jawab pengurus dan upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia. Adapun harapan penulis dengan secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan dalam hal perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia dan secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pinjam-meminjam.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif.⁴ Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif.⁵

³Sri Soedewi Masjchun Sofya, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hal.76.

⁴Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 35.

⁵Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam antara Debitur dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KSU Bhakti Mulya Surakarta Ibu Choiriyah, beliau menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di KSU Bhakti Mulya Surakarta berbentuk perjanjian pinjam meminjam (kredit) secara tertulis yaitu yang dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian pokok yang disertai perjanjian tambahan yang berupa pembebanan dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya.⁶

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta, Ibu Choiriyah bahwa untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan fidusia dari koperasi, antara peminjam dengan koperasi harus melalui perjanjian kredit, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian sebagai berikut:

Pertama, Pengajuan Permohonan Kredit. Pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit atau pinjaman harus datang ke Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta menemui ketua koperasi serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut. Ketua Koperasi akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pemohon kredit yang akan mengajukan kredit tersebut tentang segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh koperasi, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian formulir yang masih

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, tentang Jaminan Fidusia Pasal 1, angka 2.

kosong. Dalam mengisi permohonan kredit tersebut pemohon kredit diharuskan sudah menentukan barang atau hak untuk dijaminkan. Barang atau hak yang dijaminkan pemohon kredit dalam perjanjian digunakan untuk memberikan kepastian bagi koperasi bahwa pemohon kredit akan mengembalikan pinjaman beserta bunga dan beban yang akan dibayar. Koperasi menetapkan keharusan barang atau hak tertentu untuk dijaminkan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Barang atau benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak yang berupa BPKB kendaraan bermotor.⁷ Permohonan kredit yang sudah diisi lengkap oleh pemohon kredit harus dimintakan tanda tangan oleh suami atau istri sebagai pihak yang ikut serta menanggung serta meminta rekomendasi dari Ketua RT dan RW dimana pemohon berdomisili atau kepala kantor tempat dimana pemohon kredit bekerja.

Pihak yang melakukan perjanjian tentunya sudah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satunya terkait dengan hal ini adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang yang akan melakukan tindakan hukum. Anggota dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta secara keseluruhan sudah dapat dikatakan memenuhi syarat kedewasaan, hal ini terlihat dari surat permohonan kredit dan perjanjian kredit yang harus ditandatangani oleh suami atau isteri sehingga dengan demikian pemohon kredit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta memenuhi syarat kecakapan. Tingkat kedewasaan ini dapat diukur dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) butir a yang menyatakan bahwa batas dewasa adalah usia 18 tahun atau sudah menikah sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian maka batas kedewasaan tersebut dapat digunakan untuk membuat perjanjian dihadapan notaris, bahkan seorang wanita yang telah bersuami diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 sehingga ketentuan dalam Pasal 108 BW yang memandang

⁷Choiriyah, Ketua KSU Bhakti Mulya Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Juli 2017, pukul 10:00 WIB.

seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut oleh ketentuan Pasal 31 sub 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang Undang Perkawinan.⁸

Setelah pemohon kredit mengisi blangko data calon peminjam maka langkah selanjutnya petugas dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta akan menyelidiki dan menganalisis terhadap kebenaran data-data yang telah diisi oleh pemohon kredit baik melalui tahap wawancara maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Pada saat melakukan wawancara, petugas akan berusaha mengetahui secara jelas tentang keadaan pemohon kredit. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena pemohon kredit wanprestasi. Adapun keadaan pemohon kredit yang perlu diketahui kebenarannya adalah sebagai berikut: (1) *Character*. Kepribadian, moral, kejujuran, dari pemohon kredit perlu diperhatikan; (2) *Capacity* (kemampuan). *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan pemohon kredit dalam membayar angsuran; (3) *Capital* (Modal/Kekayaan). Permodalan seorang pemohon kredit juga perlu diketahui Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta, karena permodalan dan kemampuan keuangan dari pemohon kredit akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar pinjaman atau dijadikan bahan pertimbangan apakah pemohon kredit benar-benar membutuhkan kredit dan mampu melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; (4) *Collateral* (Jaminan). Peletakkan barang atau hak tertentu harus diberikan pemohon kredit sebagai jaminan dalam pelaksanaan peminjaman, jaminan ini juga menjadi tolak ukur maksimal besarnya nilai pinjaman yang dapat diberikan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta dengan ketentuan 50% dari nilai taksiran barang jaminan; (5) *Condition of Economy* (Prospek Usaha). Kredit yang akan diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁹

Setelah diadakan wawancara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki terhadap segala sesuatu yang

³Mariam Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hal 79

⁹Fariz Ghazzan, "Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit" dalam <https://catatanmarketing.wordpress.com/tag/5c-kredit/> diunduh 14 Juli 2017 pukul 19.00

menyangkut diri dan usaha pemohon untuk menentukan layak tidaknya permohonan kredit dikabulkan. Adapun pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh petugas meliputi penaksiran jaminan dan penilaian terhadap usaha bisnis pemohon kemudian setelah itu hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Ketua Koperasi.

Tahapan selanjutnya adalah (1) Analisa permohonan kredit. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa, maka akan dibuat penilaian terhadap kondisi pemohon untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas kredit; (2) Pengambilan Keputusan. Dalam pemberian kredit yang telah disetujui, maka ketua koperasi akan menandatangani blangko data calon peminjam koperasi dan selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat, sedangkan pemohon kredit hanya tinggal menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat sepihak, dan apabila pemohon kredit menerima perjanjian kredit tersebut maka pemohon harus menandatangani perjanjian kredit tersebut. Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian dan perjanjian sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Didalam pasal 1233 KUHPdata menyatakan bahwa perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian.

Untuk masalah pengamanan prefentif, pihak koperasi akan meminta jaminan atas pinjaman kepada pemohon. Barang-barang yang biasa digunakan sebagai jaminan meliputi benda bergerak yaitu barang yang sifatnya dapat bergerak atau dapat dipindahtangankan misalnya motor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan pengikatnya dapat disebut sebagai fidusia, yaitu yang dijadikan jaminan yang tidak diserahkan tetapi yang diserahkan hanyalah surat kuasa atas kepemilikan barang tersebut misalnya BPKB. Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak koperasi dan peminjam harus menjamin bahwa barang tersebut belum diserahkan secara fidusia kepada pihak lain.¹⁰

Dalam perjanjian pinjam-meminjam di KSU Bhakti Mulya para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus diketahui, antara lain: (1) Selaku pemberi pinjaman koperasi berkewajiban untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada

¹⁰Choiriyah, Ketua KSU Bhakti Mulya Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Juli, 2017, pukul 10:00 WIB.

anggota koperasi selaku peminjam; (2) Anggota koperasi yang melakukan pinjaman berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar hutang-hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perjanjian pinjaman ini hingga seluruh hutangnya lunas; (3) Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak koperasi dan peminjam harus menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan/dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam dipandang sudah tidak mampu membayar tunggakan, maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak koperasi tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu; (4) Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menuntut bunga atau kerugian apapun. Dalam hal hasil penjualan/eksekusi barang jaminan dan atau pembayaran penanggung jumlahnya kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak koperasi, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama diajukan pihak koperasi; (5) Pihak koperasi selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila: (a) Peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut; (b) Pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar; dan (c) Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia.

Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta adalah dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

3.2 Tanggung Jawab Pengurus dan Upaya Penyelesaiannya Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan Fidusia

Tanggung jawab pengurus koperasi ini berkaitan dengan kedudukan pengurus koperasi sendiri, dimana disatu pihak dia sebagai pengelola koperasi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha dan organisasi koperasi. Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya bagi pengurus atau anggota koperasi yang melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan koperasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengembalikan pinjaman uang beserta jasa pinjaman kepada koperasi menurut dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak koperasi, dan apabila masih belum bisa melunasi dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan asset peminjam.

Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi antara seperti apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran, maka pihak koperasi akan menempuh langkah-langkah yang antara lain: (1) Pihak KSU Bhakti Mulya Surakarta akan mendatangi anggota koperasi (peminjam) tersebut dan menanyakan permasalahan anggota koperasi tersebut kenapa sampai tidak membayar angsuran peminjaman. Anggota koperasi itu akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima dan masuk akal. Toleransi ini biasanya 1 sampai 2 minggu; (2) Apabila cara pertama tidak berhasil, maka pihak koperasi akan memberikan surat peingatan kepada anggota koperasi selaku peminjam; (3) Apabila peringatan tersebut tidak digubris oleh anggota koperasi selaku peminjam maka pihak koperasi akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini dilakukan hanya sekali saja dan apabila tetap tidak ada jawaban maka perkara tersebut akan berakhir dengan pelaksanaan sita jaminan; (4) Apabila anggota koperasi selaku peminjam dalam membayar angsuran melewati bulan, tidak akan dikenai denda namun diwajibkan membayar bunga atau jasa dari bulan yang tertunggak; (5) Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak koperasi tidak dikenakan denda; (6) Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak koperasi akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota

koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.¹¹ Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, antara lain:

Pertama, penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut: (1) Penjadwalan kembali, memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya; (2) Penataan kembali, merupakan tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah modal sendiri yaitu dengan menyeter *fresh money*, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit.

Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Kedua, penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain: (1) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta; (2) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan negara. Koperasi dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap si peminjam adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan

¹¹Choiriyah, Ketua KSU Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Juli 2017, pukul 10:00 WIB

¹²Choiriyah, Ketua KSU Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Juli 2017, pukul 10:00 WIB

kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini di karenakan prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.¹³

Apabila debitur (peminjam) cidera janji atau wanprestasi, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan tersebut demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan (Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (Pasal 23 (2) Undang-undang Jaminan Fidusia). Apabila penerima fidusia setuju, pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencapur atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang. Namun, persetujuan tersebut tidak berarti penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia (Pasal 23 (1) Undang-undang Jaminan Fidusia). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib.

Dalam pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban si berhutang untuk menyerahkan suatu kebendaan dan menjaga barang itu dengan baik sampai pada saat penyerahan, ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh si berhutang karena adanya keadaan memaksa maka si berhutang sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang Undang Hukum Perdata wajib membuktikan bahwa hal itu disebabkan karena ada halangan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak mempunyai salah pada munculnya halangan itu, jika si berhutang berhasil membuktikan maka dia dibebaskan dari kewajiban berprestasi kepada kreditur, namun jika dikaitkan dengan Pasal 1445 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "jika barang yang berhutang diluar salahnya si berhutang musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang maka si berhutang jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan

¹³Choiriyah, Ketua KSU Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Juli 2017, pukul 10:00 WIB

memberikan hak-hak dan tuntutan tuntutan tersebut kepada orang yang menghutangkan kepadanya, dari ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila barang yang menjadi pokok perikatan hilang atau musnah di luar salahnya salah satu pihak, tetapi pemiliknya (si berhutang) telah mengasuransikannya terhadap malapetaka seperti itu sehingga pemilik mempunyai hak hak dan tuntutan tuntutan ganti rugi. Hak dan tuntutan tersebut harus diserahkan kepada kreditur.¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia jika dikaitkan dengan penanggungan risiko terutama musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia maka pemberi fidusia tidak dapat dituntut oleh penerima fidusia untuk mengganti barang jaminan fidusia kecuali jika barang yang menjadi obyek jaminan fidusia itu diasuransikan sehingga dengan demikian resiko musnahnya barang tanpa adanya asuransi akan ditanggung oleh penerima fidusia. Kreditur mudah akan digugat ke pengadilan oleh debitur terutama dengan alasan bahwa harga barangnya rendah sehingga adalah bijaksana jika sebelum dilakukan penjualan, diadakan penafsiran harga terlebih dahulu oleh *appraiser professional* sehingga dapat ditaksir harga appraisal sebagai pedoman.¹⁵

Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain diatur dalam Bab XVI Kitab Undang Undang Hukum Perdata dibawah judul "pemberian kuasa". Pemberian kuasa yang berhubungan dengan pengalihan termasuk untuk menjamin dengan jaminan kebendaan milik pemberi kuasa maupun untuk melakukan tindakan perbuatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap harta kekayaan pemberi kuasa maka perlu diadakan pemberian kuasa secara khusus yang diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan pemberian kuasa khusus ini, pemberi kuasa dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa sebatas untuk melakukan tindakan hukum tertentu, baik yang berkaitan dengan pengalihan kebendaan, pemberian agunan atau jaminan kebendaan maupun hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan pemberi kuasa.

¹⁴J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hal. 239.

¹⁵Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 185.

Dalam hal ini maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta, antara lain (1) Bentuk pelaksanaan perjanjian antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya berbentuk perjanjian pinjam meminjam (kredit) secara tertulis yaitu yang dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian pokok yang disertai perjanjian tambahan yang berupa pembebanan dengan jaminan fidusia; (2) Modal Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta terdiri dari 2 macam yaitu modal sendiri dan modal luar atau penyertaan; (3) Bunga koperasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), suku bunga (jasa kredit) yang disepakati adalah 1,5% flat per bulan; dan (4) Tahapan-tahapan prosedur perjanjian pinjam-meminjam antara peminjam dengan melalui perjanjian kredit dengan cara mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada ketua koperasi, lalu pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian formulir yang masih kosong. Setelah pemohon kredit mengisi blangko data calon peminjam maka langkah selanjutnya petugas dari koperasi menyelidiki dan menganalisis terhadap kebenaran data-data yang telah diisi oleh pemohon kredit baik melalui tahap wawancara maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Setelah diadakan analisa permohonan maka ketua koperasi memutuskan dan menandatangani blangko data calon peminjam dan selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat.

Kedua, tanggung jawab pengurus dan upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia, antara lain: (1) Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta yaitu

seringnya anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya; (2) Tanggung jawab pengurus jika terjadi wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam akad perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur melakukan wanprestasi, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara kekeluargaan jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi pinjamannya kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta; (3) Upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.

4.2 Saran

Pertama, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta hendaknya dalam menetapkan nilai jaminan agar lebih memperhatikan dan memperhitungkan secara cermat apabila ada seorang anggota koperasi melakukan tunggakan angsuran pembayaran dalam waktu yang lama, nilai jaminan tersebut dapat untuk menutup hutang pokok dan biaya-biaya yang bersangkutan dengan keterlambatan tersebut.

Kedua, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta hendaknya menambahkan ketentuan mengenai adanya asuransi terhadap barang jaminan kedalam perjanjian kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya sehingga jika terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa terhadap hilangnya atau musnahnya barang jaminan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya masih tetap mendapatkan kepastian pengembalian piutangnya dari nasabah.

Ketiga, jika terjadi adanya suatu permasalahan atau perselisihan antara peminjam dengan pihak koperasi sebaiknya penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai mufakat.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Baswir, Revrison. 1997. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, hal, 118.
- Satrio, J. 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofya, Sri Soedewi Masjchun. 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jurnal/Web/Artikel Penelitian

- Fariz Ghazzan, "Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit" dalam <https://catatanmarketing.wordpress.com/tag/5c-kredit/> diunduh 14 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.